



Efek Moderasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Pengaruh Peran Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya

Semy Pesireron¹⁾, Aleida Marryane Tuhumena²⁾

^{1,2,*)}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Ambon

^{1,*)} semy.peron@gmail.com ^{2,*)} aleida.tuhumena@gmail.com

Abstract

The objective of this study is to empirically investigate the effect of the role of the government's internal supervisory apparatus on the quality of financial statement presentation, as well as to examine the moderating influence of the government's internal control system on this relationship within the West Southwest Maluku Regency Government. Data were collected through a survey method by distributing questionnaires to selected respondents, using a purposive sampling technique. The data were analyzed employing moderated regression analysis with a significance level of 0.05. The findings indicate that the supervisory role of the internal government auditors exerts a significant influence on the quality of financial statement presentation in the West Southwest Maluku Regency Government. Moreover, the government's internal control system is found to moderate the relationship between the supervisory role of the internal government auditors and the quality of financial statement presentation, thereby strengthening the effect within the governmental context of West Southwest Maluku Regency.
Keywords: Government Internal Supervisory Apparatus; Government Internal Control System; Quality of Financial Statement Presentation

Received by the Editorial Team: 16-11-2025 | Revised Completed: 18-12-2025 | Published Online: 31-12-2025

Introduction

Perkembangan LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dalam 5 tahun terakhir mendapat opini dari BPK atas hasil pemeriksaan LKPD adalah Wajar Tanpa Pengecualian. Walaupun mendapat opini WTP, masih ada temuan dari hasil pemeriksaan BPK RI pada tahun 2024 yakni adanya permasalahan kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024, pokok-pokok temuan antara lain: kekurangan volume pekerjaan atas sembilan paket pekerjaan pada tiga OPD yaitu; dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR serta penatausahaan aset lainnya belum memadai, (*Sumber; Hasil Pemeriksaan BPK Provinsi Maluku*). Hasil pemeriksaan atas LKPD Provinsi Maluku Barat Daya, BPK juga menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Temuan-temuan tersebut sebenarnya bisa terhindar ketika fungsi pengawasan internal oleh APIP mampu memberikan peran optimal dalam rangka

memberikan kontribusi terhadap pemerintah. APIP yang memiliki peran dan fungsi pemeriksaan dan pengawasan seharusnya meningkatkan kualitas pemeriksaannya sehingga mampu mendeteksi hal-hal dimaksud sejak dini sebelum ditemukan oleh BPK RI. Peran aparat Inspektorat penting dalam pengawasan jalannya pemerintahan. Tugasnya adalah review dalam memastikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah telah berjalan dengan baik dan menilai apakah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah disajikan dengan wajar. Di luar dari tugas tersebut, Aparat Inspektorat juga berperan sebagai konsultan yang memberikan masukan agar kedepan tujuan pemerintah dapat tercapai. Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut; pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Auditor internal pemerintah daerah ada untuk memberikan jaminan terhadap pencapaian tujuan

prinsipal yang dititipkan pada agen akan terlaksana dengan baik. Tingkat kepercayaan prinsipal kepada agen, ditentukan oleh sejauh mana auditor internal dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Auditor internal berperan sebagai penengah kedua belah pihak (agen dan principal) yang berbeda kepentingan dalam mengelola keuangan pemerintah. Tugas dari auditor internal diantaranya adalah melakukan pemeriksaan internal dan memberikan saran perbaikan terhadap kewajaran laporan keuangan. Dengan diaudit oleh auditor internal yang independen, agen dapat membuktikan bahwa kepercayaan principal tidak diselewengkan untuk kepentingan pribadi agen. Penelitian mengenai peran audit internal yang dalam hal ini APIP telah dilakukan sebelumnya oleh Zalifatih, (2022). Hasil penelitiannya menunjukkan peran APIP sebagai penjamin mutu salah satunya dilakukan dengan mereviu LKPD, dalam hal ini dikatakan berkualitas karena telah memenuhi empat indikator yakni relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Irwansyah dan Wulandari, (2018) menunjukkan hasil peran aparat pengawas intern pemerintah (APIP) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu. Lebih lanjut Istiqomah, Badar, dan Wahid, (2022) menunjukkan hasil bahwa ada pengaruh peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pangkep. Disamping itu, penelitian Kabib, Hayati dan Fatimuzzahra, (2021) juga menunjukkan peran auditor internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Salatiga. Namun hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Martiningsih, (2017) yang menunjukkan peran internal audit memiliki berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). Sistem pengendalian intern pemerintah selanjutnya disebut SPIP, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP bisa dijadikan indikator awal dalam menilai kinerja suatu entitas. SPIP merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud) secara dini. SPIP akan membantu memandu entitas berjalan bagaimana semestinya. Salah satu tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif adalah agar pelaporan keuangan reliabel. Berdasarkan hasil temuan BPK Perwakilan Provinsi Maluku dinilai adanya kelemahan sistem pengendalian intern. Oleh karena itu masih ditemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara. Pengendalian internal pemerintah sangat penting guna

meningkatkan kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya perlu meningkatkan lagi penerapan sistem pengendalian intern dan sebaiknya pemerintah juga melakukan pengkajian ulang mengenai sistem pengendalian intern pemerintah yang diterapkan tersebut karena akan berdampak pada kualitas informasi dalam laporan keuangan.

Isu tentang sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP) juga mendapatkan perhatian cukup besar. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal senantiasa menguji kekuatan sistem pengendalian internal (SPI) ini di setiap pemeriksaan yang dilakukannya untuk menentukan luas lingkup (*scope*) pengujian yang akan dilaksanakannya. Beberapa lembaga pemantau (*watch*) juga mengkritisi lemahnya SPI yang diterapkan di pemerintahan, sehingga membuka peluang yang sangat besar bagi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran (APBN/APBD). Sistem pengendalian intern yang efektif dapat memediasi dalam mengatasi permasalahan rendahnya kualitas informasi keuangan. Sistem pengendalian intern yang baik diterapkan oleh aparatur akan berdampak bagi peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Farishi & Tjun Tjun, 2024) menemukan bahwa semakin baik sistem pengendalian internal berdampak bagi peningkatan kualitas laporan keuangan. Disamping itu, sebagai variabel moderasi, sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, seperti pada hasil penelitian yang ditunjukkan oleh (da Cruz, 2024). Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Pesireron dan Situmeang, (2024) menunjukkan hasil sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap hubungan peran auditor internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku. Sistem pengendalian intern akan semakin efektif diterapkan jika aparatur pengawasan internal yang dalam hal ini auditor internal mampu memberikan peran optimal dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pemerintah, (BPK, 2023).

Kaitannya dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, teori keagenan menjelaskan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara para manajemen dan para stakeholder yang membuat pentingnya memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pihak manajemen pemerintah daerah yang cenderung menginginkan keuntungan pribadi mengakibatkan dana yang diperoleh dari pemerintah mudah disalahgunakan. Oleh karena itu, pemerintah daerah sebagai harus mendesain, mengoperasikan, dan memelihara sistem pengendalian yang baik dalam rangka menghasilkan informasi keuangan yang andal bagi principal. Sistem pengendalian intern yang efektif dapat memediasi dalam mengatasi permasalahan rendahnya kualitas informasi keuangan. Sistem pengendalian intern akan semakin efektif diterapkan jika aparatur pengawasan internal

yang dalam hal ini auditor internal mampu memberikan peran optimal dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pemerintah, (BPK, 2023). Sistem pengendalian intern yang baik diterapkan oleh aparatur akan berdampak bagi peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya adalah penulis memasukkan variabel sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi dalam melihat pengaruhnya terhadap hubungan antara peran APIP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penambahan variabel sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi dengan alasan bahwa beberapa temuan BPK atas audit LKPD masih ditemukan adanya kelemahan pada sistem pengendalian internal. Apabila sistem pengendalian internal diterapkan dengan baik, akan meningkatkan peran APIP dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah peran aparat pengawas internal pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya?
2. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah memoderasi pengaruh peran aparat pengawas internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya?

Tujuan Penelitian

Menguji secara empiris pengaruh peran aparat pengawas internal pemerintah terhadap kualitas penyajian laporan keuangan yang dimoderasi oleh sistem pengendalian internal pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Agency Theory

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principals dan agent. Pihak principal adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agent, untuk melakukan semua kegiatan atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambilan keputusan (Jensen & Meckling, 1976). Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya (Nurillah, 2014 dalam Maydiyanti, 2020).

Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas public sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi

amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu : pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horisontal).

Menurut Rosalin (2011) dalam Nurillah (2024), menyatakan berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan.

Pengaruh Peran Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) merupakan salah satu profesi yang menunjang terwujudnya GCG yang pada saat ini telah berkembang menjadi komponen utama dalam meningkatkan instansi secara efektif dan efisien. Dengan semakin baiknya proses kegiatan pengawasan atau *reviue* yang dilakukan oleh peran auditor internal (APIP) ke instansi-instansi pemerintah tentunya akan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan Pemda. Teori keagenan menjelaskan bahwa kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*). Masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan kepentingannya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan, sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang sewajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini baik. Selain itu, principal mengharapkan informasi yang disajikan oleh agen dalam pelaporan keuangan haruslah sesuai dengan kenyataannya. Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh agen, baik itu keterandalan maupun ketepatanwaktuan pelaporan sangat tergantung pada peranan aparatur internal dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Ketika agen tidak dapat memaksimalkan aparatur dimaksud, maka keinginan principal untuk mendapatkan laporan yang akurat dan berkualitas tidak akan tercapai.

Penelitian mengenai peran audit internal telah dilakukan oleh Zalifatur, (2022). Hasil penelitiannya menunjukkan peran APIP sebagai penjamin mutu salah satunya dilakukan dengan mereviu LKPD, dalam hal ini dikatakan berkualitas karena telah memenuhi empat

indikator yakni relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Irwansyah dan Wulandari, (2018) menunjukkan hasil peran aparat pengawas intern pemerintah (APIP) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu. Lebih lanjut Istiqomah, Badar, dan Wahid, (2022) menunjukkan hasil bahwa ada pengaruh peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pangkep. Disamping itu, penelitian Kabib, Hayati dan Fatimatuazzahra, (2021) juga menunjukkan peran auditor internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Salatiga. Namun hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Martiningsih, (2017) yang menunjukkan peran internal audit memiliki berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang dirumuskan adalah: *H1: Peran aparat pengawas pnternal pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.*

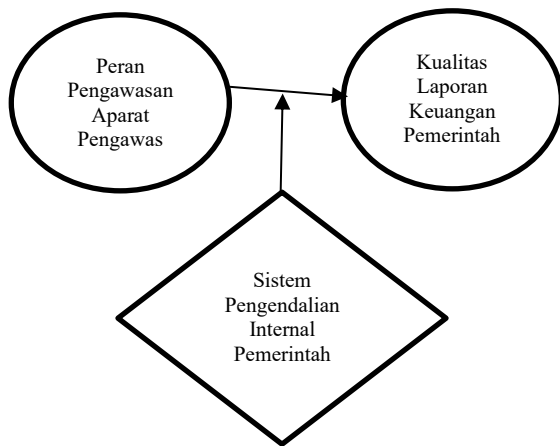
Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pengaruh Peran Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, tujuan SPIP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya diukur dari kesesuaian dengan SAP saja, tetapi juga dari sistem pengendalian internnya. Pengendalian intern akuntansi dirancang dari dua tujuan sistem yaitu menjaga kekayaan dan mengecek ketelitian serta keterandalan informasi akuntansi. Oleh karena itu, pengendalian intern meliputi rencana organisasi dan prosedur, prosedur serta catatan-catatan yang bertujuan untuk mengamankan aktiva serta dipercayainya catatan keuangan. Pengendalian intern akuntansi dibuat untuk memberikan keyakinan akan transaksi-transaksi apakah dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya. Mencatat transaksi dapat memudahkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi atau kriteria yang ditentukan yang sesuai dengan tujuan laporan tersebut. Pengendalian intern akuntansi yang baik akan tercermin dalam beberapa hal diantaranya, adanya sistem dan prosedur akuntansi, adanya sistem otorisasi, adanya pemisahan tugas, dan adanya sistem formulir, dokumen dan catatan yang akan mendukung fungsi keuangan pada pemerintah daerah dalam menghasilkan nilai pelaporan keuangan yang andal.

Kaitannya dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, teori keagenan menjelaskan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara para manajemen dan para stakeholder yang membuat pentingnya memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pihak manajemen pemerintah daerah yang cenderung menginginkan keuntungan pribadi mengakibatkan dana yang diperoleh dari pemerintah mudah disalahgunakan. Oleh karena itu, pemerintah daerah sebagai harus mendesain, mengoperasikan, dan memelihara sistem pengendalian yang baik dalam rangka menghasilkan informasi keuangan yang andal bagi principal. Sistem pengendalian intern yang efektif dapat memediasi dalam mengatasi permasalahan rendahnya kualitas informasi keuangan. Sistem pengendalian intern akan semakin efektif diterapkan jika aparatur pengawasan internal yang dalam hal ini auditor internal mampu memberikan peran optimal dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pemerintah, (BPK, 2023).

Sistem pengendalian intern yang baik diterapkan oleh aparatur akan berdampak bagi peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Farishi & Tjun Tjun, 2024) menemukan bahwa semakin baik system pengendalian internal berdampak bagi peningkatan kualitas laporan keuangan. Disamping itu, sebagai variabel moderasi, system pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, seperti pada hasil penelitian yang ditunjukkan oleh (da Cruz, 2024). Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Pesireron dan Situmeang, (2024) menunjukkan hasil sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap hubungan peran auditor internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang dirumuskan adalah: *H2: Sistem pengendalian internal pemerintah memoderasi Peran pengawasan aparat pengawas pnternal pemerintah terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.*

Berdasarkan pemikiran teoritis maka diajukan bentuk model penelitian yang merupakan kerangka konseptual dan sekaligus sebagai alur fikir dalam perumusan hipotesis penelitian sebagai berikut;



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Research Methodology

Jenis Penelitian

Penelitian dirancang sebagai penelitian kausal dengan pendekatan kuantitatif. Peneliti menggunakan desain penelitian ini untuk mengetahui apakah peran aparat pengawas internal pemerintah dan juga sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap variabel dependen kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menekankan pada pengukuran variabel dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik menggunakan analisis regresi linier berganda. Selanjutnya, jenis penelitian adalah pengujian hipotesis (*hypothesis testing*), yaitu penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel (*causal research*). Untuk melakukan pengujian terhadap hubungan antara variabel independen dan variabel dependen serta variabel moderasi, menggunakan *Moderate Regression Analysis* (MRA). Jenis data dalam penelitian ini adalah data subyek yaitu data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian (responden). Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian adalah data primer dalam bentuk opini, sikap, pengalaman atau karakteristik responden (subyek) penelitian dan instrumen yang digunakan adalah kuesioner atau angket.

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono (2019), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Populasi Penelitian

| No | Keterangan | Jumlah |
|-------|------------|--------|
| 1 | Dinas | 17 |
| 2 | Badan | 6 |
| 3 | Setda/Biro | 1 |
| 4 | Setwan | 1 |
| Total | | 25 |

Sumber; Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 27, tahun 2022

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Pengambilan sampel dengan pertimbangan penelitian yaitu ingin mengetahui informasi yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemilihan sampel penelitian didasarkan pada pertimbangan dan kriteria sebagai berikut: 1) Kepala Bagian Keuangan, 2) Kepala Sub Bagian Keuangan, 3) Bendahara dan 4) Penata Laporan Keuangan. Berdasarkan metode *purposive sampling* tersebut, maka jumlah sampel penelitian adalah sebanyak 100 responden yang tersebar pada 25 dinas dan badan di lingkup pemerintah kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Variabel Penelitian

- Variabel Dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah ; merupakan kesesuaian informasi keuangan yang disajikan oleh suatu entitas dengan standar akuntansi pemerintahan yang memberikan manfaat dan memenuhi kebutuhan para pemakai selama periode tertentu, (Wulandari dan Yulianti, 2023). Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel antara lain; Laporan keuangan sesuai dengan Standar, penyusunan laporan keuangan tepat waktu, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya, informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, informasi dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya, penyusunan laporan keuangan menggunakan kebijakan akuntansi yang telah diatur dalam Standar dan laporan keuangan yang saya buat, disusun secara sistematis dan Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan jelas dapat dipahami oleh para pengguna.
- Variabel Independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah peran pengawasan aparat pengawas internal pemerintah. Peran Pengawasan APIP adalah Pengawasan Intern didefinisikan sebagai seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, (PP Nomor 60 Tahun 2008). Indikator

yang digunakan untuk mengukur variabel meliputi; APIP memberikan keyakinan memadai bahwa proses tata kelola pemerintah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, APIP melakukan pemeriksaan secara mendadak, APIP melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai, APIP menegur pegawai yang bekerja tidak sesuai peraturan, APIP mengawasi ketaatan Instansi Pemerintah terkait pelaksanaan SPIP dan APIP hanya memeriksa ketaatan mengenai tata kelola pemerintah yang baik.

- c) Variabel Moderasi. Variabel moderasi yang digunakan pada penelitian ini adalah sistem pengendalian internal pemerintah. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (Wulandari dan Yulianti, 2023). Indikator yang digunakan untuk mengukur meliputi; pimpinan selalu melakukan pemeriksaan dan melakukan penilaian terhadap kualitas pengendalian intern, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah memiliki standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi, pimpinan melakukan analisis risiko secara lengkap terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran, pimpinan memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran, kebijakan maupun prosedur pengamanan telah ditetapkan dengan baik, instansi Pemerintah telah mengembangkan rencana untuk identifikasi maupun pengamanan atas semua transaksi, informasi disediakan secara tepat waktu dan saluran komunikasi dilaksanakan secara efektif, pengguna anggaran /pemegang kas menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat pada waktunya, organisasi Perangkat Daerah (OPD) selalu menindaklanjuti setiap hasil temuan/reviu dan pimpinan selalu mereviu dan mengevaluasi temuan yang menunjukkan adanya kelemahan dan perlu perbaikan.

Metode Analisis Data

Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum. Statistik deskriptif biasanya digunakan untuk menggambarkan profil data sampel sebelum memanfaatkan teknik analisis statistik yang berfungsi untuk menguji hipotesis.

Uji Kualitas Data

Untuk meyakinkan bahwa pengukuran yang digunakan adalah pengukuran yang tepat dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan pengujian terhadap kualitas data. Uji kualitas data dihasilkan dari penggunaan instrumen dapat dievaluasi melalui uji

reliabilitas dan validitas data. Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian dilakukan meliputi:

- a) Uji normalitas dengan menggunakan one sample Kormogorov Smirnov, grafik histogram dan grafik p-plot
- b) Uji heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik scatterplot.
- c) Uji multikolonieritas dengan menggunakan nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF).

Moderate Regression Analysis (MRA)

Moderate regression analysis (MRA) atau uji interaksi merupakan persamaan khusus regresi linier berganda dimana dalam persamaannya mengandung unsur interaksi. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka persamaan *moderate regression analysis* dijabarkan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X + \beta_2 Z + \beta_3 (X * Z) + \epsilon.$$

Results and Discussion

Statistik Deskriptif Variabel

- a) Variabel Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y). Variabel kualitas laporan keuangan diukur dengan instrumen yang terdiri atas 8 pernyataan kuesioner. Berdasarkan hasil analisis deskriptif statistik, menghasilkan rentang aktual antara nilai terendah 19 sampai tertinggi yaitu 40. Hal ini berarti, kualitas penyajian laporan keuangan yang kurang berada pada kisaran 19 dan yang lebih baik berada pada kisaran 40. Selain itu, rentang yang mungkin terjadi yaitu antara 8 menunjukkan kualitas penyajian laporan keuangan yang kurang sampai 40 menunjukkan kualitas penyajian laporan keuangan yang baik. Selanjutnya, rata-rata aktual variabel sebesar 31,54 sedangkan rata-rata teoritisnya sebesar 24. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kualitas penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya cenderung baik. Lebih lanjut, nilai standar deviasi variabel sebesar 6,398 lebih kecil dari nilai rata-rata variabel yang sebesar 31,54 sehingga disimpulkan data variabel kualitas penyajian laporan keuangan (Y) dikategorikan baik.
- b) Variabel Peran Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) (X). Variabel peran pengawasan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) diukur dengan instrumen yang terdiri atas 6 pernyataan kuesioner. Berdasarkan hasil analisis deskriptif statistik, menghasilkan rentang aktual antara nilai terendah 14 sampai tertinggi yaitu 30. Hal ini berarti, peran pengawasan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) yang kurang berada pada kisaran 14 dan yang lebih baik berada pada kisaran 30. Selain itu, rentang yang mungkin terjadi yaitu antara 6 menunjukkan peran pengawasan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) yang kurang sampai 30 menunjukkan peran pengawasan aparat

pengawas internal pemerintah (APIP) yang baik. Selanjutnya, rata-rata aktual variabel sebesar 23,20 sedangkan rata-rata teoritisnya sebesar 18. Hal ini dapat disimpulkan bahwa aparatatur negeri sipil khususnya aparat pengawas internal pemerintah (APIP) cenderung melakukan pengawasan dengan baik. Lebih lanjut, nilai standar deviasi variabel sebesar 3,751 lebih kecil dari nilai rata-rata variabel yang sebesar 23,20 sehingga disimpulkan data variabel peran pengawasan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dikategorikan baik.

- c) Variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) (Z). Variabel sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) diukur dengan instrumen yang terdiri atas 10 pernyataan kuesioner. Berdasarkan hasil analisis deskriptif statistik, menghasilkan rentang aktual antara nilai terendah 24 sampai tertinggi yaitu 50. Hal ini berarti, sistem pengendalian internal pemerintah yang kurang dilakukan berada pada kisaran 24 dan yang lebih baik berada pada kisaran 50. Selain itu, rentang yang mungkin terjadi yaitu antara 10 menunjukkan sistem pengendalian internal pemerintah yang kurang diterapkan sampai 50 menunjukkan sistem pengendalian internal pemerintah dilakukan dengan baik. Selanjutnya, rata-rata aktual variabel sebesar 38,59 sedangkan rata-rata teoritisnya sebesar 30. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah cenderung diterapkan dengan baik pada Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya. Lebih lanjut, nilai standar deviasi variabel sebesar 6,818 lebih kecil dari nilai rata-rata variabel yang sebesar 38,59 sehingga dapat disimpulkan bahwa data variabel sistem pengendalian internal pemerintah dikategorikan baik.

Hasil Pengujian Kualitas Data

Uji validitas item kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji validitas metode korelasi pearson, yaitu mengorelasikan skor item dengan skor total item.

Tabel 2. Hasil Pengujian Validitas Data

| Variabel Penelitian | Range Korelasi | Sig |
|---|----------------|------|
| Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y) | 0,91 s/d 0,95 | 0,00 |
| Peran Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) (X) | 0,73 s/d 0,88 | 0,00 |
| Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) (Z) | 0,71 s/d 0,90 | 0,00 |

Sumber: Hasil pengolahan data, 2025

Hasil pengujian validitas pada tabel di atas menunjukkan korelasi yang positif dan berada di atas batas minimal 0,30 serta tingkat signifikan pada level 0,00 dibawah tingkat signifikan 0,01. Hasil ini menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan yang mengukur variabel kualitas penyajian laporan keuangan (Y), peran pengawasan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) (X) dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) (Z) adalah *valid*.

Hasil Pengujian Reliabilitas Data

Reliabilitas instrumen dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan koefisien chronbach's Alpha. Jika nilai koefisien alpha lebih dari 0,60 maka disimpulkan bahwa instrumen tersebut handal atau reliabel.

Tabel 3. Hasil Pengujian Reliabilitas Data

| Variabel Penelitian | Nilai Cronbach Alpha |
|---|----------------------|
| Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y) | 0,92 |
| Peran Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) (X) | 0,95 |
| Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) (Z) | 0,98 |

Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2025

Hasil pengujian reliabilitas data pada tabel di atas menunjukkan koefisien cronbach's alpha keseluruhan variabel tidak ada yang kurang dari nilai batas minimal 0,60. Hal ini menyimpulkan bahwa indikator-indikator untuk masing-masing variabel dikategorikan reliabel atau handal.

Pengujian Asumsi Klasik

Hasil Pengujian Normalitas

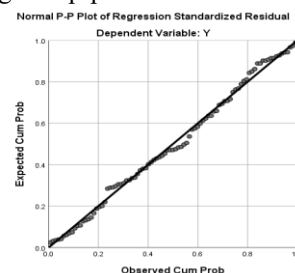
Uji normalitas data tersebut dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu menggunakan Uji Kolmogorof-Smirnov (Uji K-S Model) dan kurva penyebaran P-Plot. Untuk uji K-S yakni jika nilai hasil uji K-S > dibandingkan taraf signifikansi 0,05 maka sebaran data tidak menyimpang dari kurva normalnya itu uji normalitas. Sedangkan melalui pola penyebaran P-Plot, yakni jika pola penyebaran memiliki garis normal maka dapat dikatakan data berdistribusi normal.

Tabel 4. Hasil Pengujian Normalitas

| Keterangan | Unstandardized Residual |
|------------------------|-------------------------|
| Kolmogorov-Smirnov Z | 0,05 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | 0,20 |

Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2025

Hasil uji normalitas menunjukkan nilai kormogolov smirnov (KS) sebesar 0,056 dan nilai ini tidak signifikan pada tingkat signifikan 0,05 (karena nilai P = 0,200 lebih besar dari 0,05). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai residual terdistribusi secara normal atau memenuhi asumsi klasik normalitas. Selain uji normalitas dengan menggunakan kolmogorof-smirno test, uji normalitas juga dapat dilakukan secara grafik yaitu dengan grafik p-plot.



Gambar 2. Hasil Pengujian Normalitas Data (Grafik P-Plot)

Sumber: Hasil pengolahan data primer tahun, 2025

Hasil Pengujian Multikolinearitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi antar variabel-variabel tersebut, dapat dilihat nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai tolerance $> 0,1$ dan $VIF < 10$ maka dinyatakan tidak ada korelasi sempurna antara variabel independen dan sebaliknya.

Tabel 5. Hasil Pengujian Multikolinearitas

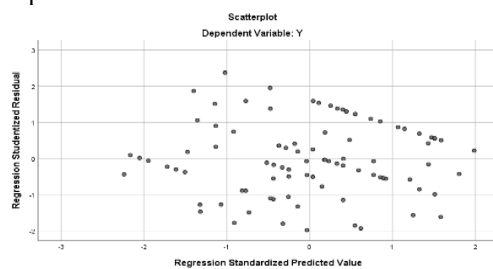
| Variabel Independen | | | Tolerance | VIF |
|------------------------------|--------------------------------|--|-----------|------|
| Peran Pengawasan Aparat | Internal Pemerintah (APIP) (X) | | 0,95 | 1,04 |
| Pengawas | | | | |
| Sistem Pengendalian Internal | Pemerintah (SPIP) (Z) | | 0,95 | 1,04 |
| Pemerintah | | | | |

Sumber: Hasil pengolahan data primer tahun, 2025

Tabel di atas menjelaskan bahwa angka tolerance dari variabel peran pengawasan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) (X) dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) (Z) hasilnya lebih dari 0,1 yang berarti bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen. Disamping itu, hasil pengujian menghasilkan nilai variance inflation factor (VIF) menunjukkan hal yang sama dimana tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Dengan demikian disimpulkan bahwa model regresi yang ada bebas dari multikolinearitas.

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Deteksi terhadap masalah heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik sebaran nilai residual. Uji heteroskedastisitas menggunakan metode grafik Scatterplot.



Gambar 3. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil pengolahan data primer tahun, 2025

Berdasarkan grafik *scatterplot* di atas tampak bahwa sebaran data tidak membentuk pola yang jelas, titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

Pembahasan Hipotesis

Pengaruh Peran Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku.

Hipotesis pertama penelitian adalah “peran pengawasan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) berpengaruh terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah”. Hasil pengujian hipotesis melalui uji t-statistik menunjukkan variabel peran pengawasan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) berhubungan positif dengan nilai

koefisien sebesar 0,411 serta nilai probabilitas sebesar 0,008 dan jika diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 maka disimpulkan, terdapat pengaruh positif signifikan peran pengawasan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) terhadap kualitas penyajian laporan keuangan, sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima. Hasil menunjukkan adanya hubungan positif yang berarti, hubungan antara kedua variabel tersebut searah. Jika aparatur pemerintah khususnya pengawasan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) memiliki peran yang baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, akan berdampak bagi semakin baik kualitas penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya. Sebaliknya, jika aparat pengawas internal pemerintah (APIP) tidak menjalankan perannya secara maksimal, berimplikasi pada menurunnya kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku barat Daya. Disamping itu, pengaruh yang signifikan menunjukkan peran pengawasan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan. Atau dengan kata lain, kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Barat Daya dipengaruhi secara langsung oleh pengawasan yang dilakukan aparat pengawas internal pemerintah (APIP).

OPD di Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, khususnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pengawasan atau reuiu pelaporan keuangan tidak terlepas dari tanggung jawab auditor internal pemerintah daerah yaitu aparat pengawas internal pemerintah (APIP). Hasil analisis deskriptif statistik menunjukkan rata-rata aktual variabel peran pengawasan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) lebih besar dari rata-rata teoritisnya. Hasil ini mengindikasikan bahwa peran pengawasan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) di OPD Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya cenderung baik. Hal ini mengindikasikan bahwa aparatur di OPD cenderung merasakan bahwa aparat pengawas internal pemerintah (APIP) sudah memberikan nilai tambah bagi pekerjaan aparatur keuangan seperti; APIP memberikan keyakinan memadai bahwa proses tata kelola pemerintah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, APIP melakukan pemeriksaan secara mendadak, APIP melakukan pengawasan dengan tegas terhadap kinerja pegawai, APIP dengan tegas menegur pegawai yang bekerja tidak sesuai peraturan, APIP dengan tegas atau mengawasi ketaatan Instansi Pemerintah terkait pelaksanaan SPIP maupun APIP memeriksa ketaatan mengenai tata kelola pemerintah yang baik.

Tanggapan responden terhadap variabel peran pengawasan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) menunjukkan rata-rata jawaban responden yang paling tinggi adalah sebesar 3,93. Nilai ini ada pada indikator 1 dan indikator 3. Hal ini mengindikasikan, responden merasa APIP memberikan

keyakinan memadai bahwa proses tata kelola pemerintah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan APIP melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai. Dengan adanya keyakinan yang diberikan APIP atas proses tata kelola serta pengawasan yang memadai akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Teori keagenan menjelaskan bahwa kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal). Masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan kepentingannya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan, sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang sewajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini baik. Selain itu, principal mengharapkan informasi yang disajikan oleh agent dalam pelaporan keuangan haruslah sesuai dengan kenyataannya. Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh agent, baik itu keterandalan maupun ketepatan waktu pelaporan sangat tergantung pada peranan aparatur internal dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Ketika agent dapat memaksimalkan aparatur dimaksud, maka keinginan principal untuk mendapatkan laporan yang akurat dan berkualitas akan tercapai.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Istiqomah et al., (2022) dimana hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan peran audit internal terhadap mekanisme GCG yang diukur dengan kualitas informasi laporan keuangan. Namun hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Martiningsih, Adha dan Inapty 2017) pada pegawai negeri sipil (PNS) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov NTB. Hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa peran auditor internal berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Penelitian lain yang mendukung hasil ini adalah Gunawan dan Alif, (2025) serta Ramadhan dan Wijaya, (2025). Hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan pengawasan internal mempengaruhi secara signifikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian lain yang tidak mendukung hasil ini adalah Wahyuni et al., (2024) dan Mentari & Kurniawati, (2024) dimana hasil penelitiannya menunjukkan peran auditor internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pengaruh Peran Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hipotesis kedua yang diajukan adalah “sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) memoderasi

pengaruh peran pengawasan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah”. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel Interaksi (Z^*X) menunjukkan adanya hubungan positif dengan nilai koefisien sebesar 0,011 serta nilai probabilitas sebesar 0,006 dan jika diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 maka disimpulkan, sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) memoderasi pengaruh antara variabel peran pengawasan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) terhadap variabel kualitas penyajian laporan keuangan sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima. Hasil menunjukkan adanya pengaruh positif sistem pengendalian internal pemerintah terhadap hubungan antara peran pengawasan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti, sistem pengendalian internal searah dengan peran pengawasan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dengan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan kata lain, penerapan sistem pengendalian internal yang baik membutuhkan peran pengawasan yang baik oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP). Tuntutan untuk menerapkan sistem pengendalian intern yang baik dalam proses pertanggungjawaban keuangan di lingkup OPD pada Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya akan memicu upaya peningkatan pengawasan dari pengawas internal pemerintah (APIP). Hal ini akan berdampak bagi semakin baik kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh aparatur.

Tanggapan responden terhadap variabel sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) menunjukkan rata-rata jawaban responden yang paling tinggi adalah sebesar 3,91 dan ilai ini ada pada indikator 1. Hal ini mengindikasikan, responden merasa pimpinan di tempat ia bekerja selalu melakukan pemeriksaan terhadap catatan akuntansi, fisik kas, barang, dan secara terus menerus melakukan penilaian terhadap kualitas pengendalian intern. Jika dibandingkan dengan rata-rata tertinggi jawaban responden variabel peran pengawasan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) yang mengindikasikan responden merasa APIP memberikan keyakinan memadai terhadap proses tata kelola pemerintah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai maka terdapat hubungan yang memperkuat. Artinya jika pimpinan di masing-masing OPD selalu melakukan pemeriksaan terhadap kualitas pengendalian intern serta didukung dengan peran APIP dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai di OPD akan berdampak pada semakin berkualitas informasi keuangan yang disajikan oleh aparatur.

Kaitannya dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, teori keagenan menjelaskan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara para manajemen dan para stakeholder yang membuat pentingnya memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pihak manajemen pemerintah daerah yang cenderung menginginkan keuntungan pribadi mengakibatkan dana yang diperoleh dari pemerintah mudah disalahgunakan. Oleh karena itu, pemerintah daerah sebagai harus mendesain, mengoperasikan, dan memelihara sistem pengendalian yang baik dalam rangka menghasilkan informasi keuangan yang andal bagi principal. Sistem pengendalian intern yang efektif dapat memediasi dalam mengatasi permasalahan rendahnya kualitas informasi keuangan. Sistem pengendalian intern akan semakin efektif diterapkan jika aparatur pengawasan internal yang dalam hal ini auditor internal mampu memberikan peran optimal dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pemerintah,. Sistem pengendalian intern yang baik diterapkan oleh aparatur akan berdampak bagi peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh oleh (Farishi & Tjun Tjun, 2024) menemukan bahwa semakin baik sistem pengendalian internal berdampak bagi peningkatan kualitas laporan keuangan. Disamping itu, sebagai variabel moderasi sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, seperti pada hasil penelitian yang ditunjukkan oleh (da Cruz, 2024). Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Pesireron dan Situmeang, (2024) menunjukkan hasil sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap hubungan peran auditor internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, penelitian lain yang dilakukan oleh Leiwakabessy Theophilia F. F, (2020) menyatakan sistem pengendalian Internal pemerintah yang dimplementasikan di Kabupaten Maluku Barat Daya oleh pimpinan maupun seluruh pegawai sebagai suatu proses yang integral belum mampu mendukung terciptanya peningkatan kualitas laporan keuangan.

Conclusion

Hasil pengujian terhadap tanggapan 91 responden memberikan kesimpulan penelitian antara lain::

1. Peran pengawasan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) berpengaruh signifikan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan OPD di Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2. Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) memoderasi pengaruh antara peran pengawasan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) terhadap kualitas penyajian laporan keuangan OPD di Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Adapun saran penelitian yang dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan serta sebagai pedoman dalam melakukan penelitian selanjutnya antara lain :

1. Aparatur yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam hal pelaporan, penyajian maupun pertanggungjawaban keuangan di OPD

Pemerintah Provinsi Maluku seharusnya ditingkatkan lagi keikutsertaannya dalam berbagai pelatihan seperti; bimbingan teknis, diklat, workshop, seminar dan kegiatan serupa lainnya. Hal ini akan menjadikan aparatur dimaksud semakin kompeten dalam melaksanakan tugasnya serta semakin baik dalam menerapkan sistem pengendalian intern dalam organisasi sehingga laporan keuangan yang disajikan akan semakin berkualitas.

2. Peningkatan peran pengawasan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) melalui peningkatan independensi, objektivitas aparatur sehingga terhindar dari hubungan-hubungan kekeluargaan dan lainnya dengan klien saat melakukan reviu. Penelitian ini dilakukan pada lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya. Penelitian selanjutnya dapat melakukan generalisasi ke beberapa Pemerintah Kota maupun Kabupaten yang ada di lingkup Provinsi Maluku.

Reference

- da Cruz, N. F. (2024). Good governance. Elgar Encyclopedia of Corruption and Society, 129–133. <https://doi.org/10.4337/9781803925806.ch29>
- Farishi, R. R. Al, & Tjun Tjun, L. (2024). Dampak Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai Pemoderasi. *Journal of Accounting, Finance, Taxation, and Auditing (JAFTA)*, 5(1), 53–65. <https://doi.org/10.28932/jafta.v5i1.7816>.
- Gunawan dan Alif. (2025). Analisis Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Indonesia. *Liabilitas: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Akuntansi* Volume 10 No.2 Agustus 2025 P-ISSN 2502-8669 E-ISSN 2809-4417 DOI: <https://doi.org/10.54964/liabilitas/>
- Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Irwansyah dan Wulandari, (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur Penata Laporan Keuangan dan Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Akuntansi FEB Universitas Bengkulu*
- Istiqomah, Badar, dan Wahid, (2022). Pengaruh Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep. *Kaizen* Vol. 1, No. 2, Desember 2022
- Kabib, Hayati dan Fatimatu Zahra. (2021). Apakah Penerapan Standar Akuntansi, Kompetensi Sumberdaya Manusia serta Peran Auditor Internal mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21 (2), 2021, 473-481

- Laiwakabessy T. F. F. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Proses Pelaporan Keuangan Kabupaten Maluku Barat Daya. *Jurnal Sosial Humaniora*, Volume 11 Nomor 1, April 2020, Page 214-224
- Mardiasmo, 2018. Akuntansi sektor publik, Andi: Yogyakarta.
- Martiningsih dan Inapty. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Peran Auditor Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmu Akuntansi* Volume 9 (1), April 2016 P-ISSN: 1979-858X; E-ISSN: 2461-1190 Page 27 – 42.
- Maydiyanti, S., Putri, A. M., & Anriva, D. H. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 10(1), 69-78.
<https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1975>
- Mentari, B., & Kurniawati, L. (2024). Pengaruh Audit Internal Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Jawa Tengah (Tahun 2018-2022). *Journal of Economic, Business and Accounting*, 7.
- Nurillah (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SKAD), Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.(Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok).
- Pesireron Semy dan Situmeang M. (2024). Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi; Dalam Hubungan Peran Auditor Internal Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan. *Journal of Business Application*. Mei 2024 Volume 3 Nomor 1. Hal. 57 – 70.
- Ramadhan dan Wijaya. (2025). Determinasi Faktor-Faktor Penentu Kualitas Laporan Keuangan: Studi pada SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia* Vol. 9 No. 2, Juli 2025.
- Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabet.
- Wahyuni, Aini, Isnaini, Soleha, Puti dan Permatasari. (2024). Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, Vol. 4 No. 1 (2024).
- Wulandari, A. D., & Yuliati, A. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jember). *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(1), hal; 637-649.
- Zalifatuh. (2022). Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dalam Penentuan Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Pamekasan. *Elektronik Thesis Institut Agama Islam Negeri Madura*.